

KETERKAITAN ISLAM DAN DEMOKRASI

Usman

STIS Darul Falah

usmanhakim90@gmail.com

Abstrak

Demokrasi merupakan pengertian yang sering didengar dikalangan masyarakat mengenal dan memahami dengan baik makna demokrasi. Demokrasi ini bagian dari sistem politik dan pemerintahan. Menurut Abraham Lincoln mengartikan demokrasi sebagai pemerintahan oleh rakyat, untuk rakyat, dan kembali pada rakyat. Demokrasi ialah salah satu konsep yang berasal dari barat dan baru masuk pada pemikiran islam pada abad ke-19 karena dianggap mempunyai nilai-nilai yang baik bagi kehidupan bermasyarakat. Demokrasi tidak hanya membahas bertentangan dengan islam, melainkan demokrasi ini ingin mewujudkan ajaran islam dalam kehidupan bernegara. Banyak ayat al-quran dan hadist yang memerintahkan untuk bermusyawarah. Bahkan tuhan menyatakan bahwa pemerintahan yang baik ditandai dengan syura (*musyawarah*). Dunia yang semakin mengglobal menciptakan keterkaitan dan ketergantungan satu dengan yang lain yang semakin kuat. Namun dimasyarakat mengalami baik kesenjangan baik secara individu, kelompok ataupun negara.

Kata kunci: Islam, demokrasi.

Abstract

Democracy is an understanding that is often heard among people who know and understand the meaning of democracy well. Democracy is part of the political and government system. According to Abraham Lincoln, democracy is government by the people, for the people, and back to the people. Democracy is a concept that originates from the West and only entered Islamic thought in the 19th century because it is considered to have good values for social life. Democracy does not only discuss conflict with Islam, but this democracy wants to realize Islamic teachings in state life. . There are many verses in the Koran and hadith that command deliberation. Even God stated that good government is characterized by shura (deliberation). An increasingly globalized world creates increasingly strong connections and dependencies on one another. However, society experiences disparities both individually, in groups and in countries.

Key words: Islam, democracy.

PENDAHULUAN

Mendirikan negara merupakan kewajiban bagi seluruh masyarakat agar terpenuhi kebutuhan, cita-cita dan tujuan hidupnya. Dalam prakteknya pembentukan

negara memiliki bentuk yang berbeda satu sama lain, tentunya berdasarkan latar belakang maupun kepentingan serta dibutuhkan masyarakatnya. Misalnya islam, tidak ada satu kesepakatan bersama sebagai bentuk negara yang bisa di ajukan sebagai model yang digariskan oleh islam (al-quran dan hadist) secara jelas.

Pengertian demokrasi lebih ditekankan pada makna kekuasaan tertinggi. Pada urusan politik yang berada di tangan rakyat. Karena itu demokrasi diartikan oleh Abraham Lincoln pada tahun 1963, yaitu ”pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat” (*goverment of the people, by the people, for the people*).¹

Pada awalnya konsep demokrasi tidak ada pemisahan kekuasaan yang jelas, semua pejabat pemerintahan bertanggung jawab sepenuhnya untuk memenuhi syarat dan mengontrol berbagai persoalan eksekutif, yudikatif dan legislatif.² Ide-ide demokrasi modern berkembang dari tradisi pencerahan yang di mulai pada abad ke-16. Tradisi tersebut adalah ide-ide yang di kuasai oleh Niccolo Macchivelli (1469-1527), ide negarakontrak oleh Thomas Hobbes (1588-1679), gagasan tentang konstitusi negara dan liberalisme, serta pemisahan kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif, dan lembaga federal oleh Jhon Locke (1632-1704), yang disempurnakan oleh Montesquieu (1689-1755) yang idenya mengenai pemisahan kekuasaan menjadi lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif, serta konsep tentang kedaulatan rakyat dan kontrak sosial yang diperkenalkan oleh Jean Jacques Rousseau (1712-1778).³

Menurut Robert A. Dahl, demokrasi harus memiliki tujuh kriteria. *Pertama*, kontrol atas keputusan pemerintah mengenai kebijakan secara konstitusional diberikan pada para pejabat yang dipilih. *Kedua*, para pejabat dipilih melalui pemilihan yang teliti dan jujur dimana paksaan dianggap sebagai sesuatu yang tidak umum. *Ketiga*, secara praksis semua orang dewasa berhak untuk memilih dalam memilih pejabat. *Keempat*, secara praksis semua orang dewasa mempunyai hak untuk mencalonkan diri pada jabatan-jabatan di pemerintahan, walaupun batasan umur untuk menduduki jabatan mungkin lebih ketat ketimbang hak pilihnya. *Kelima*, rakyat mempunyai hak untuk menyuarakan

¹Gregorius Sahdan, *Jalan Transisi Demokrasi pasca soeharto*, (Yogyakarta: pondok edukasi, 2004) h.12.

²Aden Widjan SZ, dkk. ”*Pemikiran dan Peradaban Islam*”, (Yogyakarta: Safaria insania press, 2007)h. 196.

³Masykuri Abdillah, ”*Demokrasi Dipersimpangan Makna: Respon Intelektual Muslim Indonesia Terhadap Konsep Demokrasi 1966-1993*” (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999) h. 71-72

pendapat tanpa ancaman hukuman yang berat. *Keenam*, rakyat mempunyai hak untuk mendapatkan sumber-sumber informasi alternatif. *Ketujuh*, rakyat berhak untuk membentuk lembaga atau organisasi independen.

Dalam kajian pemikiran politik islam, persoalan islam dan demokrasi menjadi perdebatan dikalangan para pemikir dan para pakar ilmu politik. Ada tiga alasan terkait hubungan islam dan demokrasi. Pertama, islam mempunyai pengalaman historis yang cukup panjang selama 15 abad yang dimulai dari praktek nabi di madinah hingga era sekarang. Kedua, islam dan demokrasi bersifat kompleks dan spesifik agar tidak reduksionisme dan cenderung menyederhanakan masalah. Ketiga, adanya pandangan yang bersifat ideologis dari berbagai kalangan atau kelompok tertentu dalam masyarakat muslim.⁴

Dalam kajian-kajian tentang hubungan islam dan demokrasi terdapat tiga pendapat yang dikemukakan oleh pemikir dan tokoh-tokoh islam tentang hubungan islam dan demokrasi. *Pertama*, tidak ada pemisahan antara islam dan demokrasi yang merupakan bagian dari islam. Karena itu, demokrasi menjadi bagian dari islam demi mewujudkan dakwah islamiyah, sehingga masuk dalam proses politik yang menjadi suatu keharusan dalam islam. Hubungan islam dan demokrasi semacam ini disebut sebagai hubungan integralistik atau hubungan yang terpadu, yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. adapun tokoh-tokoh yang termasuk ialah: Abdurrahman Wahid, Amin Rais, dan Yusuf al-Jabiri. *Kedua*, antara islam dan demokrasi memiliki hubungan yang saling bertentangan. Hubungan islam dan demokrasi dipandang saling berlawanan. Islam dan demokrasi tidak memiliki hubungan sama sekali. Keduanya saling berpisah dan tidak saling terkait. Dalam islam tidak mengenal yang namanya demokrasi dan demokrasi bersumber dari barat tidak berasal dari islam. Hubungan ini disebut dengan hubungan antagonistik atau saling bertentangan. Tokoh-tokoh yang dimaksud adalah: Taufiq Muhammad Asy-Asyawi, Sayyid Qutb dan Abu Bakar Baasyir. *Ketiga*, dalam hubungan islam dan demokrasi kelompok untuk pendapat ini pemikir dan tokoh islam tidak menerima sepenuhnya dan tidak menolak sepenuhnya. Artinya antara islam dan demokrasi memiliki kesamaan dan perbedaan. Yang memiliki

⁴Idris Thaha, ''*Demokrasi Religius: Pemikiran Politik*'' Nurkholis Madjid dan M. Amin Rais, (Jakarta:teraju, 2005) h. 7.

beberapa nilai etis yang memiliki kesamaan dengan islam, seperti kebebasan (*al-hurriyah*), persamaan (*al-Musawwa*), toleransi (*at-tasammuh*), keadilan (*al-adalah*).

Dan perbedaan demokrasi dan islam adalah dilihat dari sumbernya. Demokrasi dapat diterima dan diperlakukan dalam suatu negara harus disintesis dengan islam. Hubungan ini disebut dengan hubungan simbiosis-mutualisme atau hubungan saling menguntungkan dan memberi manfaat sehingga tidak dapat dipisahkan satu sama lain.

TUJUAN

Mengetahui dan memahami bagaimana hubungan islam dengan demokrasi di Indonesia.

PEMBAHASAN

Salah satu tokoh yang menentang adanya demokrasi ialah Syaikh Fadlullah Nuri, beliau mengatakan gagasan kunci demokrasi yaitu persamaan semua warga negara ini adalah suatu yang tidak mungkin dalam islam. Didalam islam tidak ada sesuatupun yang berhak mengatur islam. Masyarakat yang paham konstitusional didalam demokrasi dianggap bertentangan dengan islam. Dalam pandangan pemikir barat bahwa demokrasi ialah konsep tentang suara mayoritas dan dengan mudah ditolak terkait dengan hak dan keadilan tidak dapat diquantifikasi. Semakin banyak jumlah mayoritas maka tidak bisa memperbaiki moralitas masyarakat. Demokrasi merupakan alat barat yang akan menghasilkan pemerintahan yang pro terhadap barat.

Pada sebagian pemikir menyetujui adanya prinsip-prinsip demokrasi dalam islam dan tetap mengakui adanya perbedaan antara islam dan demokrasi. Keterkaitan demokrasi dan islam dilihat dari segi wawasan yaitu seperti keadilan, akuntabilitas dalam pemerintahan, hak-hak oposisi, tujuan negara dan bermusyawarah. Begitupun letak perbedaannya terdapat didalam sistem demokrasi yang memiliki hak-hak kedaulatan mutlak. Maka, dalam demokrasi islam terdapat sistem musyawarah (*syura*). Sistem islam menggunakan cara yang moderat yaitu sistem pemerintahan Theodemokrasi atau suatu sistem pemerintahan demokrasi yang dimana kedaulatan rakyatnya dibatasi oleh kedaulatan tuhan melalui hukum-hukumnya. Suatu negara tidak bisa membuat aturan undang-undang yang bertentangan dengan hukum tuhan sekalipun merupakan kesepakatan dari rakyat secara umum.

Salah satu pemikir mempunyai cara pandang yang sama tentang hubungan islam dan demokrasi. *Pertama*, jika yang dimaksud demokrasi sebagaimana yang

dikemukakan oleh Abraham Linclon maka pengertian ini juga terdapat dalam sistem pemerintahan islam, dengan pengecualian bahwa rakyat bahwa memahami islam secara komprehensif. *Kedua*, jika yang dimaksud demokrasi adalah adanya hak-hak dasar politik atau sosial tertentu, seperti asas persamaan dihadapan undang-undang kebebasan berpikir dan berkeyakinan, memberikan hak-hak tertentu. Namun, islam memandang hak-hak tersebut secara alami atau beragam. Bahkan islam menetapkan bahwa hak-hak itu merupakan dasar dari segala sesuatu atau sebagai undang-undang karena ada eksistensi atau fitrah manusia. *Ketiga*, apabila demokrasi dipahami sebagai pemisahan kekuasaan dalam lembaga-lembaga pemerintahan seperti eksekutif, yudikatif dan legislatif. Dalam demokrasi kekuasaan legislatif sebagai repretasi dari rakyat dan terpisah dari kekuasaan eksekutif yang dipimpin oleh presiden. Didalam islam membuat aturan undang-undang berdasarkan al-qur'an dan hadist. Dengan begitu pembuatan undang-undang atau hukum tersebut terpisah dari pemimpin suatu negara.

Sedangkan sisi perbedaan antara islam dan demokrasi. *Pertama*, kata "bangsa" atau "umat". Kata bangsa didasari olehletak geografis, dimana individu-individu didalamnya terikat oleh, ikatan darah, etnis,agama, bahasa, dan kultur yang berkembang dalam bangsa tersebut. Dengan kata lain,demokrasi selalu diiringi dengan pemikiran nasionalisme, atau rasialisme yang digiringoleh tendensi fanatisme.Sementara dalam islam kata "umat" tidak harus terikatsuatu tempat, darah atau bahasa. Dengandemikian, pandangan Islam sangatlah manusiawi dan bersifat internasional, hal iniamatlah penting dalam rangka mewujudkan kemaslahan manusia secara umum.

Kedua, sementara tujuan demokrasi hanya sebatas merealisasikan kesejahteraan bangsa dalam pemenuhan kebutuhan dunia yang berupa misalnya pengembangankekayaan, peningkatan gaji, dan sebagainya. Berbeda dengan tujuan sistem islam atau demokrasi islam. Yaitu mencakup pemenuhan terhadap tujuan-tujuan yang bersifat duniawi atau material, dengan memberikan semua kebutuhanyang dibutuhkan di dunia.

Ketiga, kekuasaan masyarakat dalam demokrasi bersifat mutlak. Jadi, rakyatlah yang menjadi pemegang kekuasaan tertinggi.segala keputusan yang dikeluarkan oleh dewan perwakilan ini, menjadi ketentuanyang harus dijalankan dan ditaati, walaupun ketentuan tersebut bertetangan dengan norma-norma susila.

Salah satu pemikir islam memberikan beberapa alasan persamaan antara islam dan demokrasi. *Pertama*, terkait beberapa hadist menunjukkan bahwa islam menghendaki pemerintahan yang disetujui oleh rakyat. *Kedua*, penolakan islam terhadap kediktatoran. *Ketiga*, dalam islam pemilu merupakan kesaksian masyarakat, bersikap adil dan jujur serta tidak memberikan saksi-saksi palsu. *Keempat*, demokrasi merupakan sebuah upaya untuk mengembalikan sistem kehalifahan Khulafa Rasyidin yang memberikan hak kebebasan pada rakyat. *Kelima*, negara islam merupakan negara keadilan. *Keenam*, kepemimpinan politik adalah kontrak sosial yang sah. Karena jika seorang penguasa tidak mau menerima teguran maka boleh penguasa tersebut diturunkan dari kekuasaannya dan diganti dengan yang lain.

Terkait persoalan pengintegrasian antara islam dengan demokrasi terdapat pemikir yang menerima sepenuhnya. Politik bukanlah persoalan ketuhanan atau kemaksuman. Tetapi kemanusiaan dan demokrasi adalah bagian dari perbaikan dan progresifitas sistem politik yang tak terelakkan untuk diadopsi Islam.⁵

Menyikapi perbedaan pemahaman ada beberapa alasan sebagai berikut. Pertama, salah satu pemikir yang menentang demokrasi didasari oleh kesalahpahaman mereka. Kedua, alasan penolakan dari hal-hal yang bersumber dari barat hanyalah bersifat emosional dan psikologis terhadap dunia islam. Padahal tidak semua hal yang dari Barat itu harus ditolak. Selama hal-hal yang berasal dari Barat itu bersifat positif dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam termasuk sistem demokrasi.

Pemikir-pemikir yang menentang demokrasi sebenarnya didasari oleh satu konsep bahwa Islam adalah agama yang sempurna sehingga tidak perlu lagi adapenambahan terhadapnya. Demokrasi mengendaki kedaulatan ditangan rakyat sedangkan Islam kedaulatan mutlak ada ditangan Tuhan. Demokrasi adalah produk Barat yang merupakan hasil dari pemikiran manusia. Manusia memiliki wewenang untuk menafsirkan al-Qur'an dan hadits sesuai dengan konteks suatu masyarakat kemudian membuat suatu aturan hukum sebagaimana yang dilakukan oleh khalifah-khalifah sebelumnya.

Walaupun demokrasi bersumber dari barat dan merupakan hasil pemikiran manusia dan selama nilai yang dikandungnya tidak bertentangan dengan islam maka

⁵Fahmi Huwaidi dalam Sukron Kamil, ''Islam dan Demokrasi.....'' h. 53-55

seharusnya masyarakat mengambil nilai-nilai baiknya. Sehingga demokrasi ini dapat diberlakukan dalam pemerintahan.

Islam dan demokrasi tidak perlu dipertentangkan, hal ini bersifat integral. Ada beberapa alasan yaitu: *pertama*, pemikir yang menyelaraskan hubungan islam dan demokrasi lebih bersifat moderat. *Kedua*, secara historis kehadiran islam pada saat itu sebagai bentuk ketidakadilan terhadap kaum jahiliyah waktu itu. *Ketiga*, dalam Islam dikenal prinsip-prinsip seperti kebebasan (*al-hurriyah*), kesamaan (*al-musawwa*), toleransi (*at-tasammuh*), keadilan (*al-adalah*), musyawarah(*syura*), dan kebenaran (*ash-shidq*), ini sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi. Dalam negara demokratis, prinsip-prinsip tersebut menjadi hal yang sangat dipertahankan dan diperjuangkan untuk dapat diterapkan dalam negara tersebut.

Beberapa catatan penting terhadap penerapan demokrasi khususnya di Indonesia. *Pertama*, demokrasi seharusnya berdiri di atas kepentingan mayoritas rakyat yang menjadi tujuan inti dari demokrasi, hasil dari keputusan mayoritas dalam parlemendan penyelenggaraan pemerintahan seharusnya menguntungkan dan mementingkan kepentingan mayoritas rakyat, bukan berdiri di atas kepentingan elit tertentu atau kepentingan kelompok tertentu. *Kedua*, pelaksanaan demokrasi seharusnya disesuaikan dengan konteks dan budaya masyarakat. *Ketiga*, praktek demokrasi khususnya dalam proses pemilihan eksekutif maupun legislatif, aksi masa, pelaksanaan sidang paripurna oleh anggota DPR, dan lain-lain seharusnya tetap berjalan dalam koridor dan batas-batas etika, dan tidak mencerminkan aksi-aksi yang frontal dan reaksioner.

KESIMPULAN

Para pemikir-pemikir yang menentang islam dan demokrasi pada dasarnya hanya berpandangan bahwa islam adalah agama yang sempurna yang mengatur segala aspek kehidupan. Hubungan islam dan demokrasi sebenarnya tidak bertentangan sebagaimana yang telah dikemukakan oleh para tokoh-tokoh. Ada dua alasan mengapa islam dan demokrasi tidak bertentangan. Pertama, secara historis kehadiran islam dan demokrasi sama-sama sebagai bentuk penentangan terhadap kekuasaan. Kedua, secara prinsip dan nilai antara islam dan demokrasi memiliki sisi perbedaan dan kesamaan. Diantara prinsip-prinsip dan nilai islam dan demokrasi ialah: kebebasan (*al-hurriyah*),

kesamaan (*al-musawwa*), toleransi (*attasammuh*), keadilan (*al-adalah*), musyawarah (*syura*), dan kebenaran (*as-shidq*).

DAFTAR RUJUKAN

- Aden Widjan SZ, dkk. *''Pemikiran dan Peradaban Islam''*, (Yogyakarta: Safaria insania press, 2007)
- Fahmi Huwaidi dalam Sukron Kamil, *''Islam dan Demokrasi.....''*
- Gregorius Sahdan, *Jalan Transisi Demokrasi pasca soeharto*, (Yogyakarta: pondok edukasi, 2004)
- Idris Thaha, *''Demokrasi Religius: Pemikiran Politik''* Nurkholis Madjid dan M. Amin Rais, (Jakarta:teraju, 2005)
- Masykuri Abdillah, *''Demokrasi Dipersimpangan Makna: Respon Intelektual Muslim Indonesia Terhadap Konsep Demokrasi 1966-1993''* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999)